

BAB V

KERJASAMA ANTARA INDONESIA DAN BRAZIL DI BIDANG KEAMANAN TAHUN 2010-2017

Dinamika hubungan antar negara di dalam suatu konstelasi geopolitik dewasa ini hubungannya akan semakin dinamis dengan adanya penguatan interdependensi diberbagai sektor bidang ditengah-tengah kekuatan global tersebut pola kerjasam antar negara pada dasarnya akan ada karena kedua negara memiliki common interest (kesamaan kepentingan) sehingga menurut negara-negara tersebut untuk melakukan kerjasama. Pola bekerjasama yang dilakukan antar negara-negara di dunia dibutuhkan agar sebagai bentuk dari eksistensi keberadaan negara yang berkepentingan untuk dapat melakukan interaksi dengan negara lain (Keohane, 1986). Setiap negara akan melakukan kebijakan kerjasam tersebut karena memiliki landasan mendasar yang baik dan dilihat melalui kelebihan kekurangan serta dinamika hubungan antar negara (buku putih, 2014).

Kemajuan Industri Perawatanan Brazil terutama dalam penguasaannya dibidang industri pertahanan yang telah dimilikinya dalam banyak aspek sesungguhnya telah berada diatas kemampuan Indonesia. Kolaborasi di dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dibidang Industri Pertahanan nantinya kedua negara akan dapat memproduksi alutsista yang belum mampu dibuat secara mandiri oleh Industri Pertahanan Indonesia seperti pesawat tucano. Pada pembahasan kali ini peneliti akan akan mengkaji seberapa jauh ukuran target dalam pengadaan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Brazil dibidang pertahanan. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sebagai implementasi kebijakan tersebut kerjasama dalam bidang pertahanan dengan negara-negara tertentu dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mencakup dimensi politik, ekonomi militer dan teknologi disamping itu juga kerjasama antar negara dalam bidang pertahanan juga didasarkan atas kepada kebijakan umum pertahanan negara dengan melihat kebutuhan bagi gelar kekuatan pertahanan negara.

Ketika trend kegiatan kerjasama industri pertahanan dimulai sejak pada tahun 2010 kedua negara ini telah menyepakatinya dengan menjadikan kerjasama

untuk penelitian bersama (co research), produksi bersama produk alutsista (co production) pemberian lisensi (license production) dan lainnya. Oleh karena itu, sisi waktu kerjasama pertahanan tersebut telah industri pertahanan kedua negara khususnya produk-produk yang berhasil dikembangkan oleh kedua negara dan terdapat sejumlah kerjasama atau kolaborasi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Brazil mulai dari *licensing/co production*.

Indonesia masih kurang dalam hal penguasaan bidang teknologinya sehingga membuat Indonesia bekerjasama dengan negara lain seperti Brazil kedua negara pada saat ini telah menyepakati hubungan kerjasamanya dibidang industri pertahanan, karena adanya kepentingan dimasing-masing kedua negara. Indonesia memilih negara Brazil sebagai mitra pengembangan produksi alutsista karena hingga saat ini Brazil memiliki perkembangan kemajuan Brazil dibidang industri pertahanan sudah tidak perlu diragukan lagi menurut data global Brazil berada pada peringkat urutan ke 16 di dunia sampai saat ini kemajuan tersebut tidak terlepas dari perusahaan yang bergerak dibidang pertahanan yang telah berdiri sampai saat ini kemajuan tersebut tidak terlepas dari perusahaan yang bergerak dibidang pertahanan.

Setiap negara berhak untuk memiliki kebijakannya masing-masing, termasuk dalam memilih kebijakan pertahanan negara. Kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kemampuan negara dalam memberikan dukungannya terhadap kebijakan pertahanan yang diambil. Sistem pertahanan yang diterapkan oleh negara didasari oleh beberapa faktor, seperti letak geografis negara, politik luar negeri, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan untuk merealisasikan sistem pertahanan adalah militer. Mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia, semua komponen pertahanan negara dan unsur di luar bidang pertahanan dituntut untuk saling mendukung dan bersinergi satu sama lain. Ancaman aktual yang menuntut sinergitas yang tinggi adalah ancaman terhadap konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik horizontal, radikalisme, dan berbagai kegiatan ilegal baik di darat maupun di laut yang membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman potensial seperti krisis finansial, pencemaran lingkungan, cyber crime, agresi militer, dan ancaman yang muncul di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia tetap menjadi perhatian pembangunan pertahanan negara. Ancaman aktual maupun ancaman potensial yang sifatnya militer akan berpengaruh langsung terhadap pertahanan negara. Mencermati perkiraan ancaman yang mungkin timbul, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mengantisipasi dan melakukan operasi militer pengamanan wilayah NKRI dari setiap bentuk ancaman di atas. Menyusun pertahanan negara yang kuat bukanlah suatu kemewahan, melainkan suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Namun, sebagian besar alutsista TNI rata-rata usia pakainya sudah tua (25 sampai dengan 40 tahun) dan banyak mengalami penurunan fungsi maupun kualitas. Masih kurang memadainya jumlah alutsista TNI, sarana dan prasarana pertahanan berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman.

Dengan kondisi tingkat kesiapan alutsista yang relatif masih rendah, sejalan dengan pemenuhan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh TNI pada saat ini dan beberapa tahun ke depan dikaitkan dengan kebutuhan penggantian, pemenuhan dan perawatan alutsista TNI, maka kebijakan untuk memodernisasi alutsista mutlak diperlukan. Kebijakan ini sebagai bagian dari strategi pertahanan negara yang berupa Minimum Essential Force (MEF). Salah satu wujud dari pelaksanaan strategi pemenuhan alutsista TNI adalah melalui pembelian alutsista secara impor sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam perjalanannya, Indonesia pernah membeli persenjataan militer dari produsen senjata terbesar dunia yaitu Amerika Serikat. Namun, setelah Amerika mengenakan sanksi embargo senjata terhadap Indonesia, Indonesia membuka lembaran baru kerja sama pertahanan militer dengan negara lain dalam hal pengadaan alutsista.

Salah satu negara berkembang yang menjadi mitra strategis Indonesia yaitu Brazil. Indonesia melakukan kerjasama pertahanan militer dengan Brazil dalam bentuk pembelian pesawat tempur Super Tucano, MLRS Astros II, penempatan atase pertahanan, dan latihan bersama militer. Kemajuan Brazil dalam bidang pertahanan dan militer adalah Brazil termasuk salah satu dari 10

negara yang memiliki armada perang terkuat di dunia dengan power index 0,67, anggaran pertahanan dan militer sebesar US\$ 33,142 miliar, personel militer aktif sebanyak 371.199 orang, jumlah pesawat militer sebanyak 748 unit, dan kekuatan perang angkatan laut sejumlah 109. Industri pertahanan Brazil seperti Embraer, Emgepron, Imbel, Avibras, Mectron, Britannite, Forjas taurus, CBC dan Aeroelectronica merupakan industri pertahanan yang terkuat di kawasan. Tidak hanya industri pertahanannya yang cukup populer di kawasan Amerika Latin, sebagian Afrika dan beberapa negara Eropa, Brazil juga merupakan kekuatan ekonomi baru dalam kelompok BRIC. Indonesia dan Brazil menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1953. Dalam kerjasama pertahanan militer, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembelian pesawat Super Tucano telah dilakukan pada November 2010 dengan produsen Tucano, Embraer Brazil. Sementara untuk Transfer of Technology (TOT) Multi Launcher Rocket System (MLRS) antara kedua negara dilakukan saat berlangsungnya Indo Defence 2012. Pembelian alutsista tersebut merupakan program pembangunan kekuatan pertahanan untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum/ MEF.



Gambar: Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu bersama duta besar Brazil, Rubem Antonio Correa Barbosa dalam penandatanganan perjanjian pertahanan Indonesia dan Brazil di kantor Kementerian Pertahanan Indonesia pada tahun 2017 lalu.

Brazil menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki peranan penting bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik, selain itu pemerintah Brazil juga mendukung integritas wilayah NKRI. Kerja sama bidang pertahanan militer antara Indonesia dan Brazil semakin konkret, baik dalam bentuk pembelian alat utama sistem persenjataan maupun pelatihan dan

pendidikan bagi prajurit. Kerja sama tersebut untuk meningkatkan profesionalitas TNI sekaligus memodernisasi persenjataan.

Kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran pertahanan yang tersedia mengharuskan Indonesia melakukan kerja sama militer dengan negara yang memiliki kemampuan teknologi kemiliteran yang jauh lebih maju daripada Indonesia. Kualitas dan kuantitas alutsista yang dimiliki Indonesia akan sangat mempengaruhi kedudukan Indonesia dalam kancah politik Internasional. Berdasarkan kondisi alutsista yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah seharusnya pemerintah meremajakan secara bertahap seluruh alutsista yang sudah tidak layak pakai yang dapat membahayakan keselamatan prajurit dan modernisasi mutlak dilakukan. Dalam konteks tersebut, Kekuatan Pokok Minimum (MEF) mendesak untuk dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010, pengertian MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. Upaya modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia dilakukan pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Modernisasi alutsista menjadi salah satu prioritas TNI sejak memasuki tahun anggaran 2010. Modernisasi alutsista bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan matra darat, matra laut, dan matra udara, kemandirian industri pertahanan serta meningkatkan profesionalisme TNI. Beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam memodernisasi Alutsista TNI meliputi: pertama, mengetahui dan memahami ciri-ciri keunggulan modernisasi alutsista yang sesuai dengan keperluan pertahanan negara; kedua, keselarasan dengan strategi pertahanan yang ada; ketiga, keselarasan dengan faktor ancaman yang ada; keempat, penguasaan teknologi terutama dalam bidang industri pertahanan dalam negeri; kelima, pengembangan Industri Pertahanan (Inhan) dalam negeri keenam, kesesuaian geografi; ketujuh, terintegrasi bersinergi dari semua pemangku kepentingan (stake holder), dan kedelapan, dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas) dan dukungan semua pihak. Dalam periode 2010-2014, program MEF Renstra I telah membawa banyak penambahan kekuatan alutsista Indonesia.

Selain peningkatan kesejahteraan prajurit, juga terjadi penambahan alutsista yang signifikan serta penambahan sarana pendukungnya. Minimum Essential Force (MEF) rencana strategis I (Renstra I: 2010-2014) untuk Angkatan Darat dialokasikan dengan pembelian alutsista yang salah satunya adalah MLRS Astros II, untuk Angkatan Udara dialokasikan dengan pembelian satu skuadron (16) pesawat tempur Super Tucano buatan industri pertahanan Brazil, Embraer, untuk tempur taktis “close air support”, pengintaian, dan serangan anti gerilya. Pada tahun 2014, kekuatan pokok minimum pada rencana strategis 1 dapat mencapai 40-42 persen, sebelumnya MEF pada tahun 2013 telah melampaui target 28,7 persen Anggaran Rencana Strategi 2010-2014 untuk memodernisasi alutsista TNI dianggarkan Rp 156 Triliun, dengan dana minimal Rp. 99 triliun dan dana cadangan sebesar Rp 57 triliun. Hasil alutsista yang datang pada Renstra I cukup membanggakan, karena 50% dari anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan dan modernisasi alutsista Angkatan Darat. Program modernisasi militer Indonesia ini telah membawa perubahan berarti bagi pertahanan militer Indonesia. Dengan banyaknya penambahan alutsista, kemampuan tempur TNI meningkat secara signifikan. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana menjadikan militer Indonesia sebagai yang terbesar di Asia Tenggara mengingat pada tahun 2014 ini sejumlah alutsista milik tiga matra (TNI AD AL, dan AU) semakin membaik kualitas dan kuantitasnya.

5.1 Kerangka Kerjasama Yang Telah Diatur Dalam Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia-Brazil Tahun 2017.

Dalam Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Brazil “Agreement Between the Federative Republic of Brazil and the Republic of Indonesia on Cooperation in Defense Related Matters” telah disepakati tujuh kerangka kerjasama pertahanan antar kedua negara, sebagai berikut:

- 1). Pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing-masing Kementerian Pertahanan kedua belah pihak.
 - 2). Pertemuan antar institusi pertahanan dan militer.
- Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pada institusi pertahanan kedua pihak melalui pendidikan dan pelatihan. Sistem pertahanan dan kemandirian negara yang bersifat semesta memiliki sifat-sifat, seperti kerakyatan, yaitu keikutsertaan seluruh rakyat negara sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam komponen kekuatan pertahanan kemandirian negara, kesemestaan, yaitu seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk dari luar negeri maupun dari dalam negeri, termasuk kesemestaan adalah kewilayahan, yaitu seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut (Makmur Supriyanto, Tentang Ilmu Pertahanan).

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan yang efektif adalah pertahanan dan kemandirian yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai dimana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara lain baik dikawasan maupun diluar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghormati. Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem pertahanan semesta guna mewujudkan dan

mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.

Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Fungsi pertahanan militer nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan militer maupun sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam., operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi oleh karena itu kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan keamanan. Kekuatan militer menjadi unsur yang sangat penting dalam peningkatan kapabilitas pertahanan suatu negara. Strategi dan keamanan suatu negara akan berhubungan dengan “alat” dan “tujuan”. Alat yang dimaksud adalah ialah ketersediaan sumber daya dan anggaran sedang tujuan merujuk pada target-target yang ingin dicapai berdasarkan rumusan strategi pertahanan.

4). Pertukaran pengetahuan dan pengalaman bidang operasi militer dan intelijen militer, penggunaan peralatan militer asing dan nasional, serta operasi pemeliharaan perdamaian internasional.

5). Berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi di berbagai bidang terkait pertahanan melalui pertukaran informasi, saling kunjung, dan inisiatif lainnya yang menjadi kepentingan bersama dan saling menguntungkan bagi Kementerian Pertahanan kedua negara.

6). Meningkatkan kerjasama industri pertahanan yang merupakan kepentingan bersama kedua Pihak, terutama di bidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.

- Bekerjasama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama Kedua Pihak. Indonesia sudah menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara yang ada dunia diantaranya adalah Australia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Swedia, dan

masih banyak lagi. Namun, hal ini belum memenuhi seutuhnya kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan pertahanan negaranya. Itulah sebabnya Indonesia menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain yaitu Brazil.

Kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang ini disepakati dalam sebuah nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU). Nota kesepakatan ini ditandatangani di Jepang oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu dan Duta besar Brazil pada tahun 2017. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk kerangka kerja guna meningkatkan kerjasama dan pertukaran berdasarkan prinsip kesetaraan, manfaat bersama dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara. Pertahanan Negara merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.² Pertahanan Negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Permasalahan yang dihadapi TNI AU. Beberapa permasalahan yang dihadapi AU sehingga perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Brazil belum dapat diimplementasikan adalah :

1. Mabesau belum menyusun peranti lunak tentang program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan oleh TNI AU dan FAB. Pasca penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil, seharusnya Kemhan RI segera melaksanakan pembahasan dengan Mabes TNI dan Mabes Angkatan untuk menyusun peranti lunak yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan pihak AB Brazil. Peranti lunak ini berikutnya harus didiskusikan dengan pihak Kemhan Brazil untuk menjadi kesepakatan bersama. Sampai saat ini peranti lunak tersebut

belum tersusun, termasuk yang terkait rencana program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan antara TNI AU dan FAB pun belum ada.

2. Dalam rangka implementasi kerjasama antara TNI AU dan FAB diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di semua bidang yang akan dikerjasamakan, termasuk pendidikan, latihan, operasi, logistik dan lain-lain. Sampai saat ini, perkembangan kerjasama internasional yang melibatkan TNI AU menjadi sangat lambat karena keterbatasan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di semua bidang yang akan dikerjasamakan, termasuk pendidikan, latihan, operasi dan logistik. Sampai saat ini perkembangan kerjasama internasional yang melibatkan TNI AU menjadi sangat lambat karena keterbatasan dukungan sarana dan prasana di satuan kerja yang melaksanakan kerjasama pendidikan, latihan ,operasi, dan logistic. Di lain pihak, FAB juga tidak menyediakan dukungan sarana dan prasaran yang terlalu istimewa kepada perwira tamu yang mengikuti program kerjasama (termasuk pendidikan dan latihan) di FAB, sehingga menuntut TNI AU menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan kerjasama dengan FAB.
3. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama TNI AU dan FAB, saat ini Kemhan RI, Mabes TNI dan Mabesau mengalami keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Manusia (SDM), baik untuk proses perencanaan maupun pelaksanaan. Dari sekian banyak kerjasama pertahanan yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara sahabat, maka implementasinya menjadi sangat lambat karena terbatasnya SDM di semua satuan yang terkait. Keterbatasan SDM ini terjadi kantor atase pertahanan RI di Braasilia DF, dimana Kantor Atase Pertahanan RI di Brasilia hanya memiliki satu staf militer yaitu Atase Pertahanan untuk menangani kerjasama Kemhan RI, TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan delapan negara di Amerika Selatan, yaitu Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Suriname, Ecuador, Peru dan Venezuela. Keterbatasan SDM juga terjadi di Diskersin Kemhan RI, Puskerin TNI, Hublu Spamau. Sampai di satuan operasional yang terkait kerjasama internasional TNI AU. Hublu Spamau yang terdiri dari satu pejabat paban berpangkat kolonel dan tiga pabandya

berpangkat letkol (Pabandya Kerjasama Internasional, Pabandya Protokol, dan Pabandya Atase Pertahanan) memiliki beban kerja terlalu besar untuk mengelola semua beban dan tanggung jawab kegiatan. Paban III Latihan Sopsau sampai saat ini juga mengelola latihan dalam negeri dan kerjasama internasional secara bersamaan, dan beban kerja ini juga terlalu besar. Keterbatasan kuantitas SDM juga terjadi pada satuan-satuan yang akan melaksanakan kegiatan kerjasama internasional TNI AU dan FAB, seperti Skadron Udara 2, Skadron Udara 21, dan lain-lainnya.

5.2 Brazil Mampu Membuat Pesawat Tempur Berkemampuan Anti Insurgency (Gerilya)

Pesawat Super Tucano merupakan pesawat bermesin turboprop yang di desain untuk melakukan pertempuran kelas menengah hingga pengintaian batas wilayah suatu negara. Kedatangan pesawat ini pertama kali pada 2012 yang saat itu diterima langsung oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat. Penyerahan pertama pesawat ini sebanyak empat unit dari total pesanan sebanyak 16 unit pesawat.

Kerjasama dalam pengadaan pesawat Super Tucano tersebut dimulai pada 2010 hingga 2014. Dalam kerjasama tersebut akan dijabarkan tentang Konsep kerjasama yang dikutip dari Holsti, yaitu kerjasama merupakan suatu proses dimana pemerintahan suatu negara saling melakukan pendekatan dengan membawa penanggulangan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan suatu usul dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak. Pandangan K.J Holsti tentang konsep kerjasama dalam penelitian ini yaitu pertama adalah pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan memiliki nilai dan tujuan untuk saling bertemu dan menghasilkan sesuatu untuk dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Pandangan Holsti ini dinilai tepat apabila dikaitkan dengan penelitian ini, karena Brazil selaku negara produsen pesawat Super Tucano tentu mendapat keuntungan dari Indonesia karena produk alutsista dalam negerinya dibeli oleh Indonesia serta sekaligus menjadi cara untuk mempromosikan. pesawat tempur tersebut kepada negara-negara lain

didunia, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pesawat Super Tucano.

Pandangan K.J Holsti yang kedua, yaitu pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Dalam pandangan tersebut, dapat diimplementasikan bahwa Indonesia dan Brazil tentu memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, dimana Indonesia membutuhkan sebuah perangkat alutsista untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan Brazil selaku negara produsen memberikan solusi dengan pesawat Super Tucano kepada Indonesia yang tentunya memiliki nilai ekonomi tambahan bagi Brazil karena penjualan alutsista tersebut menguntungkan bagi industri pertahanannya.

Negara dengan status sebagai negara berkembang seperti Indonesia, tentu diharuskan untuk menjalin kerjasama untuk menciptakan suatu kemajuan, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Dalam kerjasama alutsista dengan Brazil ini, dapat dilihat bahwa Indonesia cenderung mengimplementasikan kebijakan dalam negerinya untuk menciptakan kerjasama yang membutuhkan namun tidak sia-sia. Penentuan kerjasama juga dilakukan dengan perhitungan dan meminimalisir kerugiannya. Seperti yang dijelaskan oleh Holsti, di mana kebijakan suatu negara merupakan upaya suatu negara untuk meminimalkan biaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut lebih efisien demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam pandangannya, Holsti menyatakan bahwa suatu negara akan membutuhkan negara lain apabila terjadi suatu ancaman terhadap negara mereka, sehingga melakukan kerjasama dalam sebuah negara dianggap hal yang terbaik untuk meminimalisir terjadinya ancaman. Hal tersebut terlihat dengan kerjasama militer yang dilakukan oleh Indonesia dan Brazil sehingga penjabaran yang dijelaskan oleh Holsti tentang negara akan membutuhkan negara lain untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun Brazil pernah mengalami kemerosotan dalam produksi alutsista dalam negerinya, tentu diharuskan memperbaiki berbagai aspek dalam negerinya termasuk industri pertahanannya. Industri pesawat dalam negerinya,

yaitu Embraer, terus mengembangkan produknya agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan alutsista udara saat ini dengan biaya operasional yang minim. Kemampuan pesawat asal Brazil tersebut adalah untuk melakukan serangan antigerilya (counter insurgency), pengendali udara, dukungan udara (close air support), penyergapan, dan pertahanan udara. Meskipun memiliki kecepatan rendah, namun hal itu mempermudah kinerja Super Tucano untuk dapat melakukan identifikasi keberadaan musuh di medan peperangan. Di balik kemampuan peperangan yang dimiliki oleh Super Tucano, pesawat tersebut juga dapat melakukan kemampuan menjadi pesawat latih dan pengawasan wilayah udara.

Operasi-operasi militer yang terjadi dalam sebuah negara tentu tidak terlepas dari Angkatan Udara, karena Angkatan Udara merupakan suatu perangkat alutsista yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam hal kecepatan sampai ke tujuan, hingga kemampuan dalam melakukan pertempuran udara. Ketika terjadi berbagai macam operasi di Indonesia, termasuk Operasi Seroja dan Operasi tumpas, tentu TNI Angkatan Udara akan semakin mengoptimalkan peran dan fungsinya, termasuk dalam hal mempertimbangkan kemampuan dari pesawat tempurnya itu sendiri. Karena kebutuhan tersebut, maka Indonesia tentu memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan militer dalam negerinya, dan tentu dalam hal ini Brazil merupakan pilihan yang tepat. kerjasama dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang meliputi kepentingan dalam negerinya yang meminimalkan biaya yang agar lebih efisien, Hal inilah yang kemudian menarik untuk disimak mengenai faktor-faktor kerjasama tersebut. Dalam hal ini, faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang penting dalam kedua negara karena Indonesia membutuhkan alutsista udara yang memiliki biaya operasional yang terjangkau, dalam hal ini pesawat Super Tucano termasuk dalam kategori tersebut. Lalu, Brazil sebagai negara produsen pembuat pesawat tersebut juga mendapatkan keuntungan ekonomi dengan penjualannya tersebut, sehingga pemikiran dari Holsti tentang kepentingan yang bernilai efisien telah tercapai dalam kerjasama tersebut.

Negara-negara berkembang khususnya Indonesia, membutuhkan pesawat Super Tucano untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Meskipun pesawat ini termasuk dalam golongan turboprop, yaitu pesawat bermesin propeller, tetapi dengan biaya operasi yang lebih murah dibandingkan dengan pengoperasian pesawat tempur jet, maka bagi negara berkembang khususnya Indonesia, pesawat baling-baling tersebut menjadi alutsista yang dibutuhkan (TNI Angkatan Udara. Super Tucano AU). Perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memilih Super Tucano tepat jika mengutip dari teori Rational Choice yang menjelaskan bahwa pengambil kebijakan memaksimalkan nilai terhadap pilihan yang mungkin saja dapat mengandung reksiko (Rose Mcdermott, 2001).

Indonesia yang merupakan negara berkembang, tentu tidak bisa melakukan operasi militer anti-gerilya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak maupun Afganistan. Hal ini dikarenakan biaya operasional pesawat-pesawat jet tempur yang lebih mahal ketimbang pesawat jenis Turboprop seperti Ov-10 Bronco dan Super Tucano. Serangan anti-gerilya membutuhkan alutsista yang baik, di mana spesifikasi Super Tucano dianggap cocok dalam operasi tersebut, dan pengoperasian pesawat tersebut menguntungkan bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Dari penjabaran tersebut, dapat dikategorikan sebagai alasan umum pemerintah menjalin kerjasama dengan Brazil, karena pesawat tersebut memiliki kemampuan operasi tempur yang baik dan penekanan biaya operasional pesawat dinilai cocok dengan kondisi Angkatan Udara Republik Indonesia saat ini. Pembelian pesawat ini menjadi polemik ketika tidak adanya transfer of technology dari perusahaan pembuat, yaitu Embraer terhadap TNI Angkatan Udara. Namun, hasil wawancara dengan Marsekal Madya (Purn) Eris Heriyanto menjelaskan bahwa pembelian pesawat tersebut jauh sebelum Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang pada saat itu belum ada proses ToT transfer of technology (ToT) dalam pembelian pesawat Super Tucano tersebut, dan karena hal tersebut saat ini pemerintah dan TNI-AU tidak bisa menuntut adanya ToT transfer of technology (ToT).

Kebutuhan terhadap alutsista udara bagi negara-negara berkembang menjadi kesempatan bagi Brazil dalam pengembangan alutsista produknya. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman pesawat Super Tucano ke 15 negara dengan total penjualan sebanyak 650 unit. Brazil selaku produsen pesawat tersebut terus berusaha menyempurnakan pesawat tersebut, yaitu dengan memodernisasikan sistem avionik, sistem persenjataan, dan sistem komunikasi data. Perkembangan industri militer Brazil terus mengalami kemajuan hingga pemasaran pesawat dilakukan hingga ke Timur Tengah. Kegunaan pesawat Super Tucano khususnya di Indonesia memiliki kegunaan penting, mengingat kondisi wilayah negara Indonesia yang maritim sehingga membutuhkan pengawasan udara yang baik serta biaya operasional yang ringan dibandingkan dengan pesawat jenis jet seperti F-16 dan Sukhoi SU 27/30. Kebutuhan pesawatintai perbatasan cocok dilakukan oleh pesawat Turboprop di wilayah Indonesia dengan kemampuan terbang rendah dalam jangka waktu yang lama untuk anti-gerilya, serta perawatan yang murah dan mampu mendarat di landasan pacu yang sederhana.

Indonesia sebagai negara maritim yang luas serta sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta berdekatan dengan Singapura, tentu memiliki kecenderungan akan terjadinya pelanggaran batas wilayah. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya insiden pesawat asing melintas, pelanggaran perbatasan darat dan laut yang minim pengawasan, dikarenakan minimnya kekuatan udara Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya jumlah pesawat tempur yang layak beroperasi dan keterbatasan radar.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam mendatangkan pesawat Super Tucano, dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam negerinya. Minimnya radar milik TNI AU dan kekurangan pesawatintai merupakan pokok dasar persoalan yang kemudian menciptakan sebuah kerjasama militer dengan Brazil. Inovasi dari produksi pesawat tempur dari Brazil membuat pemerintah Indonesia tertarik untuk membeli pesawat Super Tucano. Banyaknya persoalan dalam negeri

terutama kebutuhan atas pesawat intai di perbatasan menjadikan kerjasama tersebut terlaksana.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dalam pengadaan pesawat Super Tucano tersebut yang memiliki kemampuan tempur kelas menengah hingga mampu terbang berkecepatan rendah untuk memaksimalkan operasi intai udara. TNI AU selaku pihak yang menjalankan pesawat tersebut sempat memprotes pengadaan pesawat tersebut karena minim alih teknologi. Meskipun belum terlaksananya transfer of technology, pemerintah dan TNI-AU tetap memaksimalkan pesawat Super Tucano dalam pengoperasiannya. Dengan demikian, ketika mendatangkan Super Tucano pada 2012, KASAU pada saat itu Marsekal TNI Imam Sufa'at menyatakan bahwa dalam mendatangkan pesawat Super Tucano sudah termasuk dalam perencanaan berdasarkan analisa dan pengkajian secara logis, sehingga penggunaan dari pesawat tersebut bisa disesuaikan dengan persepsi ancaman untuk memaksimalkan kemampuan pertahanan udara yang sudah menjadi tugas TNI-AU untuk mengamankan wilayah NKRI. Dengan demikian, dalam mendatangkan pesawat Super Tucano, TNI Angkatan Udara telah memiliki Rensra (Rencana Strategis) yang telah diperhitungkan jauh sebelum memutuskan untuk membeli pesawat Super Tucano tersebut. Rencana tersebut disampaikan oleh Marsekal Madya (Purn) Eris Heriyanto, yang menyatakan bahwa rencana pengadaan dan pengkajian terhadap pesawat Super Tucano telah dilakukan TNI-AU sejak 2005, dan sejak saat itu pesawat Super Tucano dianggap tepat dan cocok bagi TNI-AU untuk melakukan tugas-tugas dalam negeri, sekaligus sebagai pengganti dari pesawat OV-10 Bronco yang telah memasuki usia tidak layak digunakan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada 2010 Indonesia mencapai kesepakatan dengan Brazil dalam pengadaan pesawat tempur ringan jenis Super Tucano dari Brazil. Pesanan pemerintah Indonesia kepada Brazil yaitu sebanyak 16 unit pesawat. Pesawat pertama dikirimkan kepada pihak TNI AU pada 2012 sebanyak empat unit. Ketika pemerintah menjalin kerjasama dalam mendatangkan pesawat tersebut, sempat muncul polemik yang dikarenakan tidak adanya proses alih teknologi dalam pesawat tersebut. Permasalahan tidak cukup sampai disitu, kecepatan yang minim, kemampuan membawa senjata yang kurang maksimal serta sulitnya mendapatkan suku cadang dalam perawatan tersebut semakin memperburuk pengoperasian TNI AU pada pesawat tersebut. Peringkat militer Indonesia yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Brazil membuat kerjasama ini menarik untuk disimak. Dieksekusi matinya warga negara Brazil oleh pemerintah Indonesia pada awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuat Presiden Brazil Dilma Roesoff memulangkan Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Riyanto kembali ke tanah air, menjadikan hubungan bilateral Indonesia dan Brazil memburuk, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena pada 2015, hubungan Indonesia dan Brazil kembali membaik dengan diterimanya kembali Duta Besar Indonesia untuk Brazil. Dalam sejarahnya, kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia pernah mengalami pasang surut. Ketika pada masa pemerintahan Soekarno, kekuatan militer Indonesia menjadi kekuatan yang disegani oleh negara-negara di dunia, hingga kemunduran Angkatan Udara pasca peristiwa G-30S yang menyudutkan AURI pada saat itu. Embargo militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris membuat Angkatan Udara Indonesia tidak mengalami kemajuan pada masa itu. Hal tersebut berakhir ketika Indonesia menjalin kerjasama dengan Rusia dalam mendatangkan pesawat Sukhoi pada awal periode 2000.

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kekuatan militernya terus dilakukan, termasuk mendatangkan pesawat Super Tucano tersebut.

Dengan pengalaman dan sejarahnya ketika operasi militer yang pernah dilakukan seperti di Colombia dalam penumpasan pemberontak, hingga menghalau pesawat lain, serta kemampuan intai patroli yang membuat pesawat Super Tucano dianggap layak oleh pemerintah Indonesia sebagai pesawat patroli untuk pengamanan kedaulatan negara maritim seperti Indonesia. Namun, insiden terjadi pada 10 Februari 2016 ketika pesawat Super Tucano jatuh di Malang yang mengakibatkan tewasnya penerbang pesawat tersebut dan mekaniknya. Hal ini membuat TNI AU mengevaluasi pesawat tersebut dengan meng-grounded seluruh armada pesawat tersebut sampai hasil investigasi selesai dilakukan. Menarik untuk disimak mengenai faktor yang melatarbelakangi terjalinnya kerjasama antarkedua negara tersebut. Hal yang membuat penelitian ini menjadi signifikan yaitu ketika kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat 14 dunia, sedikit diatas kekuatan militer Brazil yang menduduki peringkat 17 dunia, dan memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia menjalin kerjasama dengan Brazil dalam pengadaan pesawat Super Tucano. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjalinnya kerjasama tersebut. Pertama, yaitu adanya kebutuhan akan pesawat berkemampuan operasi militer seperti peperangan kelas menengah, pengintaian batas wilayah udara, serta penghematan biaya operasional dan regenerasi alutsista khususnya pesawat tempur milik Angkatan Udara Republik Indonesia.

6.2 Saran

Kerjasama pengembangan Industri Pertahanan dengan Brazil sebaiknya tidak hanya oleh perusahaan yang sudah terkait atau BUMN yang sudah ditunjuk saja oleh pemerintah yang dapat belajar mengembangkan produk alutsista dengan Brazil. Indonesia masih kurang dalam hal penguasaan bidang teknologinya sehingga membuat Indonesia bekerjasama dengan negara lain seperti Brazil kedua negara pada saat ini telah menyepakati hubungan kerjasamanya dibidang industri pertahanan, karena adanya kepentingan dimasing-masing kedua negara. Indonesia memilih negara Brazil sebagai mitra pengembangan produksi alutsista karena hingga saat ini Brazil memiliki perkembangan kemajuan Brazil dibidang industri pertahanan sudah tidak perlu diragukan lagi menurut data global Brazil berada pada peringkat urutan ke 16 di dunia sampai saat ini kemajuan tersebut tidak terlepas dari perusahaan yang bergerak dibidang pertahanan yang telah berdiri sampai saat ini kemajuan tersebut tidak terlepas dari perusahaan yang bergerak dibidang pertahanan.

Kekuatan Industri Pertahanan Brazil terletak di sektor kedirgantaraan dan pertahanan udara. oleh karena itu, kerja sama pertahanan dengan Brazil dapat dilakukan dalam sektor-sektor tersebut. Selain itu, brazil juga memiliki kemampuan jungle warfare, sehingga kerja sama pendidikan militer dapat difokuskan pada kemampuan khusus tersebut. Hubungan Indonesia dan Brazil juga tetap dipelihara dengan baik bahkan ditingkatkan, tanpa menggadaikan nilai-nilai prioritas dan prinsipil kepentingan nasional.